

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi Indonesia, dimana sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 Tahun 2013, Kementerian Pertanian memastikan empat keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan terkait peningkatan pembangunan nasional, antara lain pencapaian swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani. Sumber daya manusia (SDM) diperlukan untuk melaksanakan empat capaian pembangunan pertanian yang memiliki sikap profesional, memiliki keterampilan dan kemampuan manajemen untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara optimal sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang diperlukan. Arsyad, (2004) mengemukakan bahwa alokasi sumber daya pertanian harus seefisien mungkin untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pengelolaan yang tidak tepat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas pertanian.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan produksi di Indonesia adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Pemberian subsidi terhadap berbagai jenis pupuk kimia diberikan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan produksi serta membantu petani mengakses pupuk dengan harga yang terjangkau (Darwis dan Supriyadi, 2016).

Pupuk memberikan kontribusi yang sangat luas dalam peningkatan produksi dan kualitas produk. Salah satu dampak positif pemupukan adalah meningkatkan

kesuburan tanah, yaitu membuat produksi tanaman relatif stabil dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kondisi iklim yang merugikan. Keuntungan lain dari pemupukan adalah melengkapi suplai unsur hara tanah, sehingga kebutuhan tanaman terpenuhi dan hasil panen maksimal. Pupuk subsidi merupakan salah satu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para petani untuk meningkatkan mutu dari hasil pertanian di Indonesia.

Subsidi pupuk diberikan oleh negara untuk industri pupuk. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET). **Berikut data jenis pupuk subsidi menurut jenis dan harga eceran tertinggi(HET).**

Sumber : Permentan No. 49 Tahun 2020

Jenis Pupuk	HET (Rp/Kg)
Pupuk Urea	Rp. 2.250/kg
Pupuk SP-36	Rp. 2.400/kg
Pupuk ZA	Rp. 1.700/kg
Pupuk NPK	Rp. 2.300/kg
Pupuk NPK Formula Khusus	Rp. 3.300/kg
Pupuk Organik Granul	Rp. 800/kg
Pupuk Organik Cair	Rp. 20.000/liter

Setiap daerah di Indonesia menerima pupuk bersubsidi, termasuk kecamatan Mestong yang menerima pupuk bersubsidi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban petani dalam menyediakan dan menggunakan pupuk dalam kegiatan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan produksi barang.

Pupuk merupakan komoditas yang memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung sektor pertanian, salah satunya produktivitas kelapa sawit. Berikut tabel luas, produksi dan produktivitas kelapa sawit di Kecamatan Mestong.

Tabel 2. Luas Lahan, produksi dan produktivitas kelapa sawit Kecamatan Mestong Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produktivitas (ton/ha)
1	2018	6.689	3.444	1,94
2	2019	970	1.244	0,77
3	2020	970	1.245	0,77
4	2021	6.689	3.467	1,92
5	2022	6.689	3.467	1,92

Sumber : Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mestong 2022

Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2019 luas lahan dan produksi mengalami penurunan yakni luas lahan kelapa sawit sebesar 1.224 Ha dan produksi sebesar 970 ton, dimana luas lahan pada tahun sebelumnya yakni 3.444 Ha dengan produksi sebesar 6.689 ton. Pada tahun 2021 luas lahan dan produksi mengalami peningkatan dengan luas lahan sebesar 3.467 Ha dan produksi sebesar 6.689 ton. Kecamatan Mestong terdiri atas 15 desa, dimana diantara 15 desa tersebut Desa Pelempang dan desa Suka Maju memiliki luas lahan kelapa tertinggi diantara desa lainnya. Berikut merupakan data luas lahan setiap desa yang ada di Kecamatan Mestong.

Tabel 3. Luas lahan kelapa sawit Kecamatan Mestong

No	Desa	Luas lahan Kelapa Sawit (Ha)
1	Pondok Meja	98 Ha
2	Suka Maju	360 Ha
3	Muaro Sebapo	120 Ha
4	Sebapo	104 Ha
5	Nagasari	101 Ha
6	Kelurahan Tempino	95 Ha
7	Desa Baru	273 Ha
8	Tanjung Pauh 32	242 Ha
9	Tanjung Pauh 39	224 Ha
10	Pelempang	365 Ha
11	Nyogan	356 Ha
12	Talang Pelita	297 Ha
13	Sungai Landai	311 Ha
14	Ibru	285 Ha
15	Suka Damai	296 Ha
	Jumlah	3,457 Ha

Sumber : Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mestong 2022

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa Desa Pelempang dan Desa Suka Maju adalah 2 desa dengan luas lahan kelapa sawit terluas di Kecamatan Mestong, dimana Desa Pelempang memiliki luas lahan 365 Ha, dan desa Suka maju memiliki luas lahan 360 Ha.. Untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit pemerintah telah memberikan bantuan berupa pupuk bersubsidi kepada petani kelapa sawit. Namun terlebih dahulu petani kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani harus melakukan usulan alokasi pupuk bersubsidi dengan pengajuan e-RDKK yang merupakan sistem elektronik rencana

definitif kebutuhan kelompok penerimaan pupuk subsidi yang ditetapkan kementerian pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Berikut data realisasi pupuk subsidi berdasarkan jenis untuk sektor pertanian Kecamatan Mestong tahun 2020-2022.

Tabel 4. Data Realisasi Penyerapan Pupuk Bersubsidi Kecamatan Mestong Tahun 2020 - 2023

NO.	JENIS PUPUK	REALISASI PUPUK BERSUBSIDI			JUMLAH (ton)
		2020	2021	2022	
1	UREA	270	230	205	705
2	SP - 36	25	70,5	103,02	198,52
3	ZA	28	16	231	275
4	NPK	428	360	257	1045
5	Organik	18	57,48	39,41	114,89

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mestong Tahun 2022

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pupuk yang terealisasi di Kecamatan Mestong pada tahun 2020-2022 yaitu dengan jumlah keseluruhan jenis pupuk Urea sebanyak 705 ton, pupuk SP-36 yaitu sebanyak 198,52 ton, pupuk ZA sebanyak 275 ton, pupuk NPK sebanyak 1.045 ton, dan pupuk organik sebanyak 114,89 ton. Jumlah pupuk yang diterima oleh petani tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan produktivitas kelapa sawit tidak begitu maksimal, salah satunya adalah alokasi pupuk subsidi tidak sesuai dengan pengajuan E-RDCK.

Efektivitas kebijakan pengadaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis kebijakan pengadaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau, Irianto & Gatot (2016). Efektivitas kebijakan

pengadaan pupuk dapat ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai, sehingga dapat mengelola pupuk yang ada demi peningkatan produktivitas hasil pertanian. Pemberian pupuk bersubsidi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemerintah untuk menekan biaya pengadaan pupuk bagi petani.

Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk mengurangi beban petani dalam penyediaan dan kebijakan pengadaan pupuk di lahan pertaniannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya. Pelaksanaan program pupuk bersubsidi harus memenuhi enam indikator yang dapat dinilai efektif yaitu tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Namun dalam prakteknya masih banyak kendala dan kekurangan, terutama dalam hal pendistribusian pupuk ke petani. Salah satu permasalahan yang dihadapi petani yaitu keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi sehingga mengharuskan petani memberikan pupuk tidak tepat waktu yang pada akhirnya akan berdampak pada produktivitas kelapa sawit yang akan mengalami penurunan. Masalah lain yang dihadapi petani adalah ketersediaan pupuk yang belum mencukupi, adanya ketimpangan antara usulan pupuk sesuai e-RDKK dan realisasi dan pendistribusian pupuk bersubsidi tidak terlepas dari ketidaktepatan yang akan mempengaruhi efisiensi pendistribusian pupuk bersubsidi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai “Hubungan Efektivitas kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi dengan produktivitas kelapa sawit di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi”

1.2 Rumusan Masalah

Setiap wilayah yang ada di Indonesia mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi

dengan tujuan mengurangi beban petani untuk menyediakan dan menggunakan pupuk di lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan produksi barang-barang pertanian. Pupuk merupakan komoditas yang memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung sektor pertanian, salah satunya produktivitas kelapa sawit.

Untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit pemerintah telah memberikan bantuan berupa pupuk bersubsidi kepada petani kelapa sawit. Namun terlebih dahulu petani kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani harus melakukan usulan alokasi pupuk bersubsidi dengan pengajuan e-RDKK yang merupakan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok penerimaan pupuk subsidi yang ditetapkan kementerian pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan produktivitas kelapa sawit tidak begitu maksimal, salah satunya adalah alokasi pupuk subsidi tidak sesuai dengan pengajuan E-RDKK.

Pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi enam indikator yang dapat dinilai efektif yaitu tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Namun dalam praktiknya masih banyak kendala dan kekurangan, terutama dalam hal pendistribusian pupuk ke petani. Salah satu permasalahan yang dihadapi petani yaitu keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi sehingga mengharuskan petani memberikan pupuk tidak tepat waktu yang pada akhirnya akan berdampak pada produktivitas kelapasawit yang akan mengalami penurunan. Masalah lain yang dihadapi petani adalah ketersediaan

pupuk yang belum mencukupi, adanya ketimpangan antara usulan pupuk sesuai e-RDCK dan realisasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Bagaimana produktivitas kelapa sawit di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana hubungan efektivitas kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi dengan produktivitas kelapa sawit di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
2. Untuk mengetahui produktivitas kelapa sawit di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
3. Untuk mengetahui hubungan efektivitas kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi dengan produktivitas kelapa sawit di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi

2. Sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait agar dapat meningkatkan keefektifitasan kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi.
4. Bagi dinas terkait diharapkan mampu menambah informasi ilmu pengetahuan serta masukan dalam mengambil kebijakan dalam penyaluran pupuk bersubsidi